

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat

Oleh:

Dian Irmawani¹, Nila Rosdiana^{2,3}, dan Budi Dharma³

Fakultas Ekonomi dan Disnis, Jurusan Manajemen

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: dianirmawani66@gmail.com, nilarosdiana12@gmail.com, budidharma@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Akuntansi yang dibuat untuk menyajikan ataupun menyusun laporan keuangan pemerintah memiliki prinsip standar akuntansi pemerintah. Dimana standar akuntansi pemerintah ada pada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005. Hasil dari kinerja Pemerintahan sebuah daerah pada satu periode akuntansi itulah yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah. Adanya laporan keuangan pada sebuah pemerintahan sudah menjadi sesuatu yang harus di siapkan oleh pemerintahan daerah setiap tahunnya, karena dengan adanya sebuah laporan dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan sebuah wilayah baik itu penerimaan ataupun pengeluaran setiap anggaran yang diberikan Negara terhadap sebuah pemerintahan, untuk penyusunan juga sebuah pemerintahan harus mengikuti struktur atau ketentuan pada peraturan perundang undangan pemerintah terkait laporan keuangan. Kemudian metode yang dipakai oleh peneliti dalam analisis ini yaitu analisis deskriptif. Data yang didapatkan dari analisis dengan membuat wawancara, observasi dalam bidang keuangan ,membuat catatan dan dokumen dengan objek yang ingin dianalisis yang berkaitan terhadap penusunan laporan keuangan pemerintahan kabupaten langkat. Kemudian hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu kabupaten langkat sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 terkait Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berhasilnya kabupaten langkat menyajikan laporan keuangan daerah disebabkan oleh faktor pendukung diaman factor pendukung tersebut adalah sumber daya manusia serta pendukung lain. Factor pendukung berpengaruh terhadap baik atau tidaknya hasil laporan keuangan pemerintahan karena jika pemahaman pegawai atau sumber daya manusia rendah kemungkinan hasil yang di peroleh tidak maksimal. **Kata kunci:** laporan keuangan daerah, SAP, sumber daya manusia

ABSTRACT

Accounting made to present or compile government financial reports has the principles of government accounting standards. Where government accounting standards exist in Government Regulation No.24 of 2005. The results of the performance of a regional government in one accounting period are referred to as government financial reports. The existence of a financial report in a government has become something that must be prepared by regional governments every year, because with a report you can find out the financial condition of a region, whether it is receipts or expenditures, every budget given by the State to a government, to compile a government must also following the structure or provisions of government laws and regulations related to financial reports. Then the method used by researchers in this analysis is descriptive analysis. Data obtained from analysis by conducting interviews, observations in the financial sector, making notes and documents with objects to be analyzed relating to the preparation of financial reports for the Langkat district government. Then the results obtained from the research are that Langkat Regency has prepared financial reports in accordance with Government Regulation No. 24 of 2005 regarding the Government Accounting System (SAP). The result is that Langkat district presents regional financial reports caused by supporting factors where these supporting factors are human resources and other supports. Supporting factors influence whether or not the results of government financial reports are good because if the understanding of employees or human resources is low, it is possible that the results obtained will not be optimal.

Keywords: regional financial report, SAP, human resources

Latar Belakang

Di era yang sekarang ini merupakan suatu era dimana masyarakat dunia tidak bisa menghindarinya masyarakat Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat dunia mempunyai tugas secara berkelanjutan berpartisipasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Kemudian reformasi pengelolaan keuangan negara terus dilaksanakan terus menerus. Hal tersebut bertujuan supaya amanat yang ada pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 terkait Keuangan Negara, yang mewajibkan Keuangan Negara diolah dengan baik, taat berdasarkan aturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, bertanggung jawab serta transparan dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan, bisa semakin diciptakan.

Terutama untuk Laporan keuangan yang dipakai dalam membandingkan realisasi pendapatan, transfer, belanja, serta biaya dengan anggaran yang sudah dibuat, menggambarkan keadaan keuangan, efektifitas, efisiensi, serta mengevaluasi sebuah entitas laporan, maupun mempermudah membuat ketentuannya pada peraturan perundang-undangan.

Menyusun sebuah laporan keuangan yang berdasarkan dengan SAP merupakan untuk memperbaiki kuantitas laporan keuangan menjadi lebih baik, dimana maksudnya adalah bisa meningkatkan kredibilitas serta bisa menciptakan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian laporan keuangan juga dapat menggambarkan kondisi keuangan pada sebuah wilayah dan bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sebuah wilayah untuk penggunaan anggaran setiap tahunnya.

Menurut Bastian (2006:18) sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang ada dimasa lalu maupun sekarang digambarkan pada perhitungan APBD memakai konsep pembukuan tunggal yang berbasis kas.

SAP sudah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 juni 2005. Hal ini merupakan pertama kali Indonesia mempunyai standar akuntansi pemerintah dari Indonesia merdeka. Munculnya SAP memperkuat fungsi utama akuntansi pada laporan keuangan pada pemerintah daerah. Maka dari itu bisa disimpulkan Indonesia masuk ke babak baru pada laporan keuangan aktivitas pemerintahan Indonesia.

Dari penjelasan sebelumnya, semakin memacu peneliti untuk membuat penelitian tentang fungsi penting sistem akuntansi keuangan daerah (SIKAD) dengan judul: "Analisis Penyajian Laporan Keuangan pemerintahan kabupaten Langkat".

Tujuan Penelitian

Adapun analisis dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Langkat berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:11) dengan waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik sudah berkembang dengan begitu pesat. Sekarang ada akuntansi yang dilaksanakan beberapa lembaga perusahaan milik Negara/daerah, pemerintahan serta beberapa organisasi publik lain. Ada kewajiban besar masyarakat yaitu dilakukannya akuntabilitas serta transparansi publik dari beberapa lembaga publik.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:167) karakteristik akuntansi sektor publik terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Pada akuntansi pemerintahan memungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu jenis dana.
2. Pemerintah membukukan anggaran saat anggaran itu di bukukan. Anggaran adalah bagian yang penting dalam pemerintahan yang merupakan dasar dilakukannya sebuah aktivitas.
3. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga pada akuntansi sektor publik tak ada laporan laba serta treatment akuntansi yang berhubungan dengannya.

Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Darise (2008:161) umumnya fungsi serta tujuan dari laporan keuangan sektor publik ialah:

1. Kelangsungan organisasi
2. Hubungan masyarakat
3. Sumber fakta dan gambaran
4. Kepatuhan dan pengelolaan
5. Akuntabilitas dan Laporan Retrospektif
6. Perencanaan dan informasi otorisasi

Sistem pencatatan

Menurut Halim (2009:42) akuntansi merupakan tahap pengidentifikasian, mengukur pengelolaan serta pencatatan keuangan pada sebuah organisasi. Adapun maksud dari pengidentifikasian yaitu pengidentifikasian transaksi ekonomi, supaya bisa dibedakan yang bersifat tidak ekonomi atau yang ekonomi. Umumnya transaksi ekonomi merupakan kegiatan yang berkaitan terhadap uang, tahap berikutnya yaitu mengukur transaksi ekonomi yang mana menggunakan dengan satuan utang. Dengan adanya akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan dimana akuntansi mempermudah pemerintah dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Akuntansi dapat mempercepat dan mempermudah perhitungan, pencatatan serta penyusunan laporan keuangan sehingga tahap pengelolaan bisa berjalan dengan efektif.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Darise (2009:77) sistem Akuntansi keuangan daerah merupakan sesuatu susunan yang terstruktur terhadap sebuah teori ataupun asas dalam tahap pengukuran dan pencatatan serta pengidentifikasian, laporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda yang disusun untuk informasi untuk membantu membuat ketentuan ekonomi yang dibutuhkan oleh beberapa pihak eksternal entitas pemda yang membutuhkan informasi yang diperoleh dari akuntansi keuangan daerah ini diantaranya yaitu DPRD, badan pengawasan keuangan, investor, donator, serta kreditur, analisis ekonomi pemerintah daerah yang diharuskan ada pada lingkungan akuntansi keuangan daerah. Kemudian SAK menjadi tahapan yang saling berkaitan dalam proses mengelola dokumen untuk memperoleh hasil berupa informasi dimana informasi tersebut diperlukan untuk menyusun neraca serta laporan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dan ini juga dapat mempermudah pengelolaan pemerintah untuk mendapatkan sebuah hasil laporan keuangan yang baik

Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2007:20) selama masa pra desentralisasi fisikan dan otonomi daerah belum ada sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif . tercatat hanya sebatas tatabuku pengolahan daerah yang didasarkan terhadap buku manual administrasi keuangan daerah tahun 1981 yang dalam esensinya belum di isi akuntansi namun Cuma penatausahaan keuangan ataupun tata buku. Bagian ini juga sangat berpengaruh terhadap pengolahan keuangan daerah Karena berdasarkan ketentuan yang sudah diterapkan pemerintah bagian ini tak bisa dipisahkan dari pengolahan keuangan daerah dimana bagian ini mempunyai peran yaitu mencatat sepenuhnya transaksi yang terjadi mulai dari pengeluaran ataupun penerimaan uang dalam periode anggaran satu tahun. Bisa dikatakan dengan adanya penatausahaan keuangan ini dapat mempermudah pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan efektif.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penyusunan SAP dibutuhkan sebuah komite standar yang independen serta dibuat berdasarkan peraturan pemerintah sesudah memperoleh pertimbangan dari BPK. Maka dari itu presiden RI sudah membuat ketentuan presiden No 84 Tahun 2004 terkait KSAP, yang mana diganti menjadi ketentuan presiden No 2 tahun 2005. Dengan diterapkannya peraturan ini menuntut sebuah pemerintahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan yang lebih baik

Lingkungan Yang Mempengaruhi

Supaya memperoleh sebuah tujuan, kemungkinan dampak dari lingkungan begitu berpengaruh terhadap suksesnya atau tercapainya akuntabilitas serta transparansi sebuah entitas ialah lingkungan internal serta eksternal yang menjadi beberapa faktor yang membentuk, efektifnya pertanggung jawaban serta stransparansi entitas terhadap tanggung jawab maupun wewenang yang dilimpahkan. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap sebuah laporan keuangan, jika kita misalkan sumber daya manusia ataupun pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab nya masing-masing dengan baik kemungkinan hasil laporan keuangan yang diperoleh menjadi lebih efektif sedangkan apabila sektof internalnya yaitu sumber daya manusia atau pegawainya berbuat tidak sesuai dengan ketentuan dan tugasnya masing masing kemungkinan hasil laporan keuangan yang diperoleh bisa menjadi tidak berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2009:18) suatu laporan keuangan merupakan produk akhir pada tahap akuntansi yang sudah dikerjakan. Kemudian laporan keuangan yang dibuat perlu memenuhi beberapa prinsip yang didasarkan pada PP No 24 Tahun 2005. Adapun Laporan keuangan daerah merupakan hasil dari tahap, pencatatan pengukuran serta pengidentifikasian terhadap transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dibuat untuk informasi pada rangka mempertanggungjawabkan pengolahan keuangan daerah serta membuat ketentuan ekonomi dari beberapa pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang membutuhkannya. Dengan adanya laporan ini setiap tahun nya dapat menilai maju atau tidaknya sebuah pemerintahan atau berkembang atau tidaknya sebuah pemerintahan, bukan hanya itu dari laporan ini juga bisa diketahui tingkat kesuksesan pemerintahan dalam menggunakan ataupun mengelola anggaran yang diberikan Negara setiap tahun. Bisa dilihat apa saja yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan dengan uang anggaran.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dikutip dari Halim (2009:20) mengatakan jika tujuan umum laporan keuangan yaitu memberikan informasi terkait kondisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan sebuah entitas laporan yang berguna ketika mengevaluasi serta membuat sebuah keputusan terkait alokasi sumber daya secara spesifik. Dengan adanya pelaporan ini Negara dapat mengetahui keadaan keuangan sebuah pemerintahan daerah Negara juga dapat menilai bagaimana hasil pengelolaan sebuah pemerintahan dalam menggunakan anggaran Negara yang sudah diberikan. Baik atau tidaknya sebuah kegiatan yang dilakukan sebuah pemerintahan dengan menggunakan uang anggaran bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat. Dimana ini bisa mempermudah Negara untuk mengambil langkah ataupun wewenang terhadap sebuah pemerintahan supaya untuk tahun berikutnya ada perbaikan atau adanya perubahan yang baik terhadap sebuah pemerintahan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diciptakan pada informasi akuntansi sampai bisa memenuhi dari sebuah tujuan. Komite standar akuntansi pemerintahan (2007 : 10) mengemukakan jika empat karakteristik berikut ini adalah syarat normatif yang harus dilaksanakan supaya laporan keuangan pemerintahan bisa berkualitas berdasarkan dengan yang diharapkan.

1. Bisa dipahami
2. Bisa dibandingkan
3. Andal
4. Relevan

Dengan adanya karakteristik ini bisa menjadi sebuah pedoman pemerintah bagaimana sebuah pemerintahan dalam menyusun sebuah laporan keuangan daerah.

Unsur keuangan pemerintah daerah

Adapun Unsur laporan keuangan yang ada pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yaitu :

1. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan arus kas
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Neraca

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Kuncoro (2007:125) Data adalah sumber informasi ataupun keterangan terkait dengan objek yang ingin dianalisis serta menjadi dasar untuk membuat sebuah ketetapan. Adapun data yang dipakai pada penyusunan serta penulisan penelitian banyak data yang kualitatif yang meliputi uraian serta keterangan.

Tempat dan waktu Penelitian

Untuk lokasi penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu dikantor bupati , kemudian penelitian dilaksanakan mulai bulan oktober sampai selesai.

Prosedur Penelitian

Tahap-tahap yang dilalui pada prosedur penelitian yang mana bertujuan mengetahui penyusunan laporan keuangan dikabupaten langkat yaitu:

1. Melaksanakan analisa terkait penyajian laporan keuangan dalam kaitannya dengan Permendagri No 13 tahun 2006 merupakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Mempelajari dan mengetahui penyajian laporan keuangan daerah yang dibuat dalam bagian keuangan.
3. Mempelajari penyajian laporan keuangan daerah di kabupaten langkat.

Metode Analisis

Berdasarkan Sugiyono (2011:21) metode yang dipakai dalam menganalisis serta menggambarkan sebuah hasil penelitian namun tidak dipakai dalam membuat kesimpulan. Metode yang dipakai dalam analisis data yaitu metode deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten langkat dilaksanakan oleh bidang keuangan. Bidang ini adalah bidang yang ada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta langsung dikoordinasi oleh Biro Keuangan dan aset dan Asisten Administrasi umum sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing. Prosedur keuangan daerah Pemerintah kabupaten langkat di mulai ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sahkan DPRD. Sesuai dengan APBD yang di sahkan oleh sub bidang Anggaran membuat Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pemerintah dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh satuan kerja yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten langkat.. SPP yang dibuat oleh setiap satuan kerja diverifikasi oleh Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Anggaran.

Penyajian laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat

Pemerintahan kabupaten langkat untuk laporan keuangan Daerah didasarkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 dengan malakukan tata usaha keuangan daerah dengan acuan sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, serta Pertanggung jawaban keuangan daerah yang meliputi dari Laporan Realisasi/Perhitungan APBD, perhitungan anggaran, Arus kas, laporan serta Neraca. Laporan yang disusun pada penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan pemerintah dan berpedoman pada ketetapan yang sudah dibuat.

Faktor Pendukung Dalam Penyajian Laporan keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Langkat

Adapun perangkat pendukung untuk penyusunan laporan keuangan daerah pemerintahan kabupaten langkat yaitu meliputi sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja dalam penyajian laporan keuangan daerah dan juga perangkat pendukung yang ingin dipakai sehingga dalam menyajikan laporan keuangan sama dengan SAP. Sumber daya manusia ataupun pegawai pada pemerintahan kabupaten langkat sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif namun karena rendahnya pemahaman atau pengetahuan yang

dilike oleh pegawai m sehingga hasil yang di peroleh untuk penyajian laporan keuangan belum maksimal sehingga memerlukan bantuan dari BPK..

PEMBAHASAN

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah kabupaten Langkat

1. Laporan Realisasi Anggaran

Yaitu merupakan laporan yang berisi informasi perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang sudah di anggarkan pada satu tahun anggaran mulai dari kelompok pendapatan, pembiayaan maupun belanja. Realisasi anggaran tahun ini disusun sesuai dengan banyaknya realisasi, belanja, pembiayaan, serta pendapatan yang di bandingkan pada masing-masing anggarannya berdasarkan dengan APBD kabupaten Langkat Tahun ini .dengan adanya laporan ini dapat membantu mengetahui perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan pendapatan dan anggaran sebuah pemerintahan daerah.

2. Neraca

Yaitu salah satu bagian laporan keuangan daerah. Neraca daerah berisi tentang informasi terkait ekuitas, utang serta posisi aktiva dana dalam akhir anggaran. Pemerintahan kabupaten langkat membuat neraca dengan mencatat, menganalisis, mengumpulkan anggaran serta realisasi pada pos neraca.

3. Laporan Arus Kas

merupakan laporan yang berisi informasi arus kas keluar dan juga arus masuknya kas pada pemerintahan kabupaten langkat selama anggaran tahun ini. Arus kas di klasifikasi menjadi 4 kegiatan yaitu :

1. investasi
2. operasi
3. Pembiayaan
4. Laporan dan Catatan keuangan

Adapun catatan atas laporan keuangan berisi tentang informasi terkait penjelasan pos-pos laporan keuangan, dalam catatan atas laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan serta diumumkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Anggaran ditahun sebelumnya , Pemerintah kabupaten langkat didalam penyusunan Laporan Keuangan sudah sama dengan SAP No.24 tahun 2005 serta sudah sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006. Tetapi pada nama hal Laporan Realisasi Anggaran maupun nama Laporan Arus Kas, Pemerintahan kabupaten langkat masih memakai nama laporan yang diterapkan pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Dari analisis yang dilakukan laporan yang di sajikan sudah begitu baik dan efektif dimana pemerintahan kabupaten langkat dalam penyusunan laporannya sudah menerapkan sesuai ketentuan yang ada dan juga dilandas dengan peraturan pemerintah yang disudah diterapkan sehingga hasil yang diperoleh sudah baik dan potensi tercipnya pemerintahan yang baik cukup besar.
2. Pemerintahan kabupaten Langkat pada anggaran tahun sebelumnya belum menyajikan Laporan Keuangan Daerah tepat waktu. Namun dalam laporan keuangan itu dibuat ditahun yang berakhir 31 Desember 2021, tapi nyatanya selesai dan di sahkan diakhir juli 2022, yang berdasarkan ketetapan harusnya disahkan pada 6 (enam) bulan sesudah selesainya tahun anggaran. Pada penyerahan ataupun penyajian laporan keuangan diharapkan tahun tahun berikut nya pemerintahan kabupaten langkat dapat menyelesaikan laporannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang telah dibuat dalam laporan keuangan daerah.
3. Dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan kabupaten langkat masih memakai bantuan tenaga pendamping dan konsultan dari BPK. Ini dikarenakan kemampuan pegawai atau sumber daya manusia yang masih rendah untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun penyebabnya yaitu karena sering terjadi perubahan Peraturan Pemerintah, yang memerlukan waktu yang lama unruk mensosialisasikannya pada setiap pegawai yang ada didalam penusunan laporan keuangan. Hendaknya di tahun tahun berikutnya pemerintahan daerah kabupaten langkat dapat mempekerjakan sumber daya manusia ataupun pegawai yang berkualitas yang memiliki pengetahuan tinggi dan benar benar memahami akuntansi sehingga hasil yang di peroleh di tahun tahun berikutnya jauh lebih baik guna untuk mencapai mewujudkan pemerintahan yang efektif dan baik.

Saran

Ditahun anggaran selanjutnya pemerintah Daerah kabupaten Langkat didalam penyusunan laporan keuangan daerah beracuan seluruhnya terhadap SAP, serta kinerja pemerintah daerah kabupaten langkat bisa lebih efektif dengan membuat bebrapa upaya agar bisa menjamin terpeliharanya situasi yang kondusif dan aman yang menjadikan tuntunan masyarakat yang menghendaki akuntabilitas dan transparansi pemerintah yang bebas KKN bisa tercapai. Selanjutnya ditahun berikutnya hendaknya pemerintahan kabupaten langkat dapat menggunakan anggaran yang diberikan Negara untuk membuat kegiatan atau lainnya yang benar benar bermanfaat bagi masyarakatnya dan dapat mensejahterakan masyarakat kabupaten langkat. kemudian

membuat laporan keuangan ditahun berikutnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan terakhir hendaknya sumber daya manusia ataupun pegawai yang ada pada pemerintahan kabupaten langkat mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai wawasan yang bnyak dan mempunyai pemahaman yang benar-benar paham terhadap akuntansi sehingga dapat mempermudah pemerintahan kabupaten dalam menyusun laporan keuangan setiap tahun nya, karena dengan adanya sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki pengetahuan yang tinggi dapat menjamin baiknya sebuah laporan keuangan daerah guna untuk mewujudkan atau menciptakan pemerintahan yang baik (efektif) dab berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Farida. 2008. Peran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Bastian. Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro. Mudrajad. 2007. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi II. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Sinaga. Jamason. 2007. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta